



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

UPAYA BNN DALAM MEMBERANTAS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI JALUR LAUT

Poedji Poerwanti

Analisis Kebijakan Ahli Muda
poedji.purwanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Penyelundupan narkotika yang berasal dari Tawau, Malaysia, berhasil digagalkan oleh tim gabungan di sekitar Teluk Palu, Perairan Sulawesi pada 18 November 2024. Operasi ini melibatkan Direktorat Interdiksi Narkotika Bea dan Cukai, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara), Kanwil Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur, Bea dan Cukai Pantoloan, Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai Pantoloan, serta Bea dan Cukai Nunukan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN).

Penindakan terhadap penyelundupan narkotika ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea dan Cukai Sulbagtara, Sri Lestari Pujiastuti, mengungkapkan bahwa penindakan dimulai setelah tim gabungan menemukan kapal mencurigakan di sekitar Teluk Palu. Proses operasi berlangsung tidak kurang dari tujuh jam, sejak malam hingga dini hari, akibat kapal kandas dan pelaku melarikan diri ke dalam hutan di pinggir Teluk Palu. Dalam operasi tersebut, dua orang yang diduga sebagai pelaku berhasil ditangkap, bersama barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 19.846,43 gram atau setara dengan 19,8 kilogram. Selain itu, satu orang yang diduga sebagai penerima barang berhasil diamankan, sementara seorang lainnya masih dalam pengejaran. Para pelaku diduga melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Sejalan dengan berbagai kasus terkait peredaran maupun penyelundupan narkoba di Indonesia, pada momentum Hari Anti Narkotika Internasional, 26 Juni 2024, Kepala BNN Marthinus Hukom, menyampaikan data bahwa sekitar 80% penyelundupan narkotika di dunia menggunakan jalur laut. Di Indonesia, angka ini bahkan mencapai 90% dari total kasus yang berhasil diungkap.

Oleh karena itu, BNN terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka memperkuat pengawasan, termasuk penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BNN dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kedua Lembaga tersebut sepakat untuk memperkuat penjagaan, pengawasan, dan pencegahan peredaran gelap narkotika di wilayah perairan Indonesia. BNN juga menjalin kerja sama dengan Kepolisian Kerajaan Malaysia. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Marthinus Hukom dengan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Diraja Malaysia (JSJN PDRM), Dato Khaw Kok Chin, di BNN pada 28 November 2024.

Kedua pihak menyepakati kerja sama strategis khususnya dalam pertukaran informasi terkait jaringan peredaran gelap narkoba lintas negara. Selain itu, Dato Khaw Kok Chin juga bertemu dengan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Brigjen Mukti Juharsa, yang mengungkapkan bahwa banyak buronan narkoba asal Indonesia yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) melarikan diri ke Malaysia, sementara DPO asal Malaysia berada di Indonesia. Polri dan JSJN PDRM sepakat untuk memperkuat kerja sama, termasuk menutup jalur-jalur masuk di wilayah Sumatera dan Kalimantan guna memberantas peredaran gelap narkoba.

Komitmen BNN dalam memberantas peredaran narkoba tercermin melalui tiga *moral standing* yang disampaikan oleh Marthinus Hukom dalam sambutan *focus group discussion* BNN, dengan tema “Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 Guna Mewujudkan Sinergi Penanganan Tindak Pidana Narkoba” pada 25 November 2024. Salah satu *moral standing* tersebut adalah melakukan tindakan represif terhadap jaringan sindikat narkoba termasuk penegakan hukum secara menyeluruh.

Atensi DPR

Berdasarkan Pasal 71 UU Narkoba, BNN memiliki kewenangan yang diperkuat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus peredaran narkoba. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat memastikan bahwa BNN menjalankan komitmennya dalam memberantas penyelundupan narkoba melalui jalur laut secara efektif, dengan penegakan hukum yang didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang akurat. Komisi III DPR RI juga perlu mendorong penguatan koordinasi antara BNN dan Polri untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Menghadapi tantangan besar dalam mengatasi penyelundupan narkoba melalui jalur laut, Komisi III DPR RI dapat memastikan BNN telah memberdayakan masyarakat di wilayah pesisir melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan pembekalan guna mencegah masuknya narkoba melalui wilayah pantai.

Sumber

bnn.go.id, 26 dan 27 November 2024;
jpn.com, 25 November 2024;
Media Indonesia, 29 November 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

